

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Penyajian Laporan Keuangan

2.1.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir atau ringkasan dari setiap hasil transaksi-transaksi keuangan dengan tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan yang lengkap disajikan dengan berbagai cara seperti terdapatnya neraca, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Hal tersebut disajikan dengan layak, jujur, lengkap dan jelas untuk mengungkapkan mengenai operasional keuangan perusahaan tersebut. Melalui laporan keuangan sumber informasi untuk pengguna mengetahui dengan detail pengelolaan pada keuangan (Mulyati et al., 2021).

Laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap informasi pada perusahaan. Melalui laporan keuangan dapat mengetahui perkembangan pada perusahaan dalam hal pendapatan maupun pengeluaran dengan periode tertentu serta informasi keuangan perusahaan lainnya. Pencatatan laporan keuangan harus disesuaikan dengan sistem akuntansi yang berlaku dan menggunakan aplikasi yang terkomputerisasi yang memudahkan untuk pengguna menginput data pada keuangan. Hal tersebut supaya laporan keuangan yang dibuat secara cepat, tepat serta mengurangi terjadinya kesalahan dalam pencatatan (Rahmayuni, 2017). Berdasarkan definisi diatas laporan keuangan diperlukan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut sebagai bentuk pelaporan serta

pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dalam mengelola keuangan daerah.

Laporan keuangan memiliki tujuan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, berikut tujuan dari laporan keuangan :

1. Terdapatnya informasi yang berisi sumber dana, pengalokasian dan penggunaan dana tersebut.
2. Terdapatnya informasi penerimaan dana dan periode dana itu berjalan saat digunakan untuk memenuhi biaya pengeluaran.
3. Terdapat informasi yang berisi sumber daya yang digunakan serta pencapaian yang telah dicapai sebagai pelaporan entitas.
4. Terdapat informasi yang mana berisi bagaimana entitas pelaporan menggunakan dana untuk memenuhi kegiatan dengan ketersediaan dana
5. Terdapat informasi yang berisi laporan posisi keuangan, laporan entitas dan bentuk penerimaan lainnya dalam jangka panjang maupun jangka pendek serta pungutan pajak dan pinjaman.
6. Terdapat informasi perubahan dalam laporan mengalami kenaikan maupun penurunan serta akibat dari hal itu terjadi.

2.1.2 Penyajian Laporan Keuangan daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang pedoman standar terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penyajian laporan keuangan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas. Terkait hal tersebut dalam penyajian laporan keuangan

daerah dilaksanakan dengan melaporkan semua transaksi dengan lengkap dan jujur serta terstruktur sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan (Kurniawan & Rahayu, 2019).

Menurut Superdi, (2017) penyajian laporan keuangan merupakan pedoman penting dalam mewujudkan adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan tersebut harus memenuhi karakteristik melalui PP Nomor 71 tahun 2010 serta dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan definisi penyajian laporan keuangan daerah diatas, penyajian laporan keuangan daerah merupakan proses penting dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan karakteristik yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memenuhi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan pemerintah.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 indikator untuk penyajian laporan keuangan sesuai dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Relevan, dapat dikatakan jika penyajian laporan keuangan memuat informasi yang jelas. Informasi tersebut memuat evaluasi kegiatan masa lalu atau masa kini dan dapat memprediksi masa depan serta dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan sesuai dengan informasi relevan yang telah disajikan. Sebagai berikut unsur dari informasi yang dinyatakan relevan :

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*), disediakan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan sebagai alat koreksi atas kegiatan dimasa lalu.
 - b. Manfaat prediktif (*predictive value*), digunakan sebagai prediksi dimasa yang akan datang melalui hasil data masa lalu atau masa kini.
 - c. Tepat Waktu (*timeliness*), dalam penyajian laporan keuangan ketepatan waktu mempengaruhi pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap informasi yang terkait dalam penyajian laporan keuangan setiap butirnya mengandung unsur yang jelas agar tidak adanya kesalahan dan jika terdapat kesalahan agar cepat untuk dicegah.
2. Andal, dalam penyajian laporan keuangan informasi yang terkait tidak menyesatkan dan disajikan sesuai dengan fakta yang ada, jujur serta dapat dipertanggungjawabkan atas perhitungannya. Untuk memenuhi itu diperlukan unsur sebagai berikut :
- a. Penyajian jujur, kejadian atau kegiatan yang dilakukan yang diharapkan penyajian laporan keuangan secara jujur dan wajar sesuai dengan keadaan yang ada.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), dimana jika informasi dari penyajian laporan keuangan diuji dengan beberapa pihak dengan hasil yang sama.
 - c. Netralitas, informasi yang dihasilkan tidak hanya untuk satu pihak yang membutuhkan melainkan untuk semua pihak atau umum.

3. Dapat dibandingkan, laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang dapat dibandingkan dengan periode waktu yang sama dan perusahaan yang sama atau sejenisnya.
4. Dapat dipahami, laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang dapat dipahami pengguna dengan bentuk dan isi yang disesuaikan pemahaman pengguna.

2.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Putri (2017) aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan penerapan penting dalam akuntansi keuangan daerah yang dilakukan pemerintah. Melalui aksesibilitas laporan keuangan masyarakat akan mudah untuk memperoleh informasi. Aksesibilitas laporan keuangan menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sederhananya, aksesibilitas laporan keuangan melekat dan sangat penting bagi masyarakat sebagai sumber informasi untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan.

Aksesibilitas laporan keuangan suatu kemudahan yang diberikan kepada pengguna dalam mengakses laporan keuangan. Adanya aksesibilitas laporan keuangan tidak hanya dapat diketahui oleh orang, lembaga dan badan tertentu. Melalui aksesibilitas laporan keuangan memberikan masyarakat luas untuk mendapatkan informasi pertanggungjawaban terkait aktivitas dan kegiatan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah (Fauziyah & Handayani, 2017).

Berdasarkan definisi tersebut aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan kewajiban yang diberikan pemerintah untuk masyarakat luas dan bukan hanya orang, lembaga dan badan tertentu untuk mengakses informasi pertanggungjawaban pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah. Menurut (Fauziah & Handayani, 2017) untuk memenuhi akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah perlu memenuhi prinsip aksesibilitas laporan keuangan dengan indikator sebagai berikut :

1. Keterbukaan, dimana laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasi dengan terbuka untuk pengguna laporan keuangan
2. Kemudahan, dimana pemerintah memberikan kemudahan agar informasi yang tersampaikan kepada pengguna laporan keuangan mudah dan jelas
3. *Accesible*, dimana masyarakat dibantu dengan melihat laporan keuangan yang disajikan melalui akses internet (*website*).

2.3 Sistem Pengendalian Internal

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal menjelaskan bahwa :

“Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sistem pengendalian internal merupakan proses secara integral pada aktivitas yang dijalani oleh pegawai yang dapat berkelanjutan yang diperlukan pada suatu organisasi, dengan tujuan untuk menciptakan

keyakinan yang utuh terhadap tercapainya tujuan organisasi (Sunarmo *et al.*, 2018). Sistem pengendalian internal memiliki struktur, metode dan ukuran yang digunakan kelompok atau organisasi dimana telah dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian serta keandalan data dalam mendorong kepatuhan dalam kebijakan manajemen dan efisiensi. Pada pengendalian internal memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi, keandalan dalam laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kebijakan tersebut didesain oleh dewan komisaris, manajemen serta personel lainnya (Gustina, 2021).

Melalui definisi tersebut dalam instansi dengan sistem pengendalian internal merupakan proses dalam aktivitas berkelanjutan pada pegawai untuk mencapai tujuan yang utuh serta menciptakan keyakinan kepada masyarakat. Sistem pengendalian memberikan adanya dorongan untuk jaminan dalam tercapainya efisiensi dan keandalan pada laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 indikator untuk sistem pengendalian internal dibagi 5 (lima) sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Pengendalian internal memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan kewenangan dan tanggung jawab serta peran dalam pengawasan internal efektif sehingga hubungan kerja yang ditetapkan kondusif dan sehat

2. Penilaian Risiko

Kesesuaian tujuan kegiatan dalam melakukan tujuan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Pada penilaian risiko mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan serta dapat menganalisis kemungkinan risiko yang terjadi.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi memiliki tindakan untuk mengatasi risiko serta pelaksanaan dalam kegiatan yang dilaksanakan secara efektif. Kegiatan tersebut dapat berupa *review* kinerja serta melaksanakan pembinaan pada sumber daya manusia.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi melakukan identifikasi dengan menggunakan komunikasi dan informasi yang efektif dengan waktu yang tepat.

5. Pemantauan

Pimpinan Instansi melaksanakan pemantauan terhadap sistem pengendalian internal serta melakukan evaluasi secara terpisah.

2.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Wicaksono, (2015) Akuntabilitas menjadi isu penting pada kajian ilmiah serta praktik dalam administrasi publik. Hal tersebut karena publik menjadi perhatian besar bagi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, kegiatan serta aktivitas yang dilaksanakan pada organisasi sektor publik. Perhatian tersebut menjadi salah satu bentuk konsekuensi bagi pemerintah dikarenakan masyarakat telah membayar

pajak dan retribusi. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia menjadi negara yang demokrasi terkait hal tersebut organisasi sektor publik dituntut untuk akuntabel pada setiap tindakan yang telah dilakukan.

Menurut Mustofa (2012) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah daerah atas seluruh kegiatan dan aktivitas dalam mengelola keuangan daerah. Hal tersebut menjadikan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang mudah diakses dengan berbagai pihak untuk mengetahui informasi tersebut. Melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan mencakup adanya penerimaan serta pengeluaran yang dilakukan dalam instansi pemerintah. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik dengan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang ada (Fauziah & Handayani, 2017).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi proses dari pengelolaan keuangan daerah yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan sebagai bentuk pelaporan kepada masyarakat dan lembaga legislatif seperti DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang berhubungan dengan terdapat kegagalan bahkan keberhasilan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya (Putri, 2017). Berdasarkan definisi tersebut akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi suatu proses sangat penting dalam

pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan perencanaan, pelaksanaan serta memberikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Superdi (2017) yang menjadi indikator dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Kejujuran dan Hukum yang berlaku
2. Dengan proses yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
3. Program yang telah ditetapkan
4. Kebijakan pemerintah sebagai standar dalam membuat kebijakan

2.5 Kerangka Konseptual

2.5.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan (*agency theory*). Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan adalah hubungan yang didasari adanya satu orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Melalui teori keagenan ini hubungan yang digambarkan dengan adanya pihak *principal* dan pihak *agent*. Pihak *principal* merupakan pihak yang memberikan wewenang kepada pihak *agent* sebagai pihak untuk mempertanggungjawabkan wewenang tersebut.

Keterkaitan teori keagenan dengan penelitian ini terdapat adanya hubungan pihak *principal* dan pihak *agent*. Hal tersebut terlihat bahwa *principal* yang dipandang sebagai masyarakat sedangkan *agent* dipandang

sebagai pemerintah. Masyarakat yang dipandang *principal* yang memberi wewenang dalam mengelola sumber daya daerah. Kemudian untuk pihak *agent* dipandang sebagai pemerintah daerah yang diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya daerah serta memberi laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas segala aktivitas maupun kegiatan dalam mengelola sumber daya tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Terdapatnya laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan mempengaruhi kepercayaan pihak *principal* sebagai masyarakat terhadap pihak *agent* dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

2.5.2 Hubungan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Kurniawan & Rahayu (2019) penyajian laporan keuangan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang pedoman standar terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penyajian laporan keuangan daerah menjadi faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas. Terkait hal tersebut dalam penyajian laporan keuangan daerah dilaksanakan dengan melaporkan semua transaksi dengan lengkap dan jujur serta terstruktur sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan.

Penyajian laporan keuangan adalah salah satu faktor penting dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan disusun melalui ketentuan yang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) dan indikator pendukung dengan relevan, andal, dapat dibandingkan serta dipahami (Fauziyah & Handayani, 2017). Oleh karena itu semakin baik penyajian laporan keuangan yang disajikan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.5.3 Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat dan bukan hanya pihak-pihak tertentu. Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan penerapan penting dalam akuntansi keuangan daerah yang dilakukan pemerintah. Melalui aksesibilitas laporan keuangan masyarakat akan mudah untuk memperoleh informasi. Aksesibilitas laporan keuangan menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sederhananya, aksesibilitas laporan keuangan melekat dan sangat penting bagi masyarakat sebagai sumber informasi untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan (Putri, 2017). Terkait hal tersebut dengan semakin baik aksesibilitas laporan keuangan yang disajikan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.5.4 Hubungan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dibutuhkan suatu organisasi pada aktivitas yang dilaksanakan oleh pegawai dalam organisasi tersebut secara berkelanjutan untuk menciptakan dan tercapainya tujuan organisasi tersebut (Sunarmo et al., 2018). Sistem pengendalian internal memiliki struktur, metode dan ukuran yang digunakan sebagai pendorong dalam kepatuhan, ketelitian serta keandalan, dalam kelompok atau organisasi, selain itu sistem pengendalian memberikan kebijakan jaminan hukum sesuai dengan ketentuan yang disusun oleh komisaris, pihak manajemen serta personel lainnya (Gustina, 2021). Untuk itu semakin baik sistem pengendalian internal yang disajikan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah melakukan penelitian terdahulu mengenai penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berikut lima penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai referensi utama.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis Penelitian	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1	Fauziyah & Handayani, (2017)	Variabel Independen X1 : Penyajian Laporan Keuangan Daerah	1. Dalam penelitian ini penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan daerah

		<p>X2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah</p> <p>Variabel Dependen</p> <p>Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>menyatakan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah</p> <p>2. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diterapkan dengan adanya laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab serta memberi kemudahan untuk publik mengakses tersebut.</p>
2	Sabriani & Rahayu, (2020)	<p>Variabel Independen</p> <p>X1 : Penyajian Laporan Keuangan Daerah</p> <p>X2 : Sistem Pengendalian Internal</p> <p>Variabel Dependen</p> <p>Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Dalam penelitian ini penyajian laporan keuangan simultan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan.</p> <p>2. sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan.</p>
3	Putri, (2017)	<p>Variabel Independen</p> <p>X1 : Penyajian Laporan Keuangan Daerah</p> <p>X2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah</p> <p>X3 : Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Daerah</p> <p>Variabel Dependen</p> <p>Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Dalam penelitian ini, ketiga variabel yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan serta sistem pengendalian internal menyatakan bahwa hasil dari uji hipotesis dari ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>

4	Mulyanto <i>et al.</i> , (2020)	<p>Variabel Independen X1 :Sistem Akuntansi Keuangan Daerah X2 : Penyajian Laporan Keuangan Daerah X3 : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah X4 : Desentralisasi Fiskal</p> <p>Variabel Dependen Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Variabel Moderating Sistem Pengendalian Internal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penelitian ini sistem akuntansi keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 4. Penelitian ini sistem pengendalian internal pemerintah memperkuat pengaruh sistem akuntansi keuangan dan penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 5. Sistem pengendalian internal pemerintah tidak memoderasi pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 6. Kemudian desentralisasi fiskal diperlemah dengan sistem pengendalian terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
---	---------------------------------	---	--

5	Defana & Rahayu (2023)	<p>Variabel Independen X1 : Kualitas Laporan Keuangan X2 : Sistem Pengendalian Internal X3 : Aksesibilitas Laporan Keuangan</p> <p>Variabel Dependen Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penelitian ini variabel kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Kemudian untuk hasil secara parsial diperoleh bahwa kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3. Sistem pengendalian internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
---	------------------------	--	---

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang pedoman standar terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penyajian laporan keuangan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas. Terkait hal tersebut dalam penyajian laporan keuangan daerah dilaksanakan dengan melaporkan semua transaksi dengan lengkap dan jujur serta terstruktur sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan (Kurniawan & Rahayu, 2019).

Terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan penyajian laporan keuangan disusun melalui ketetapan yang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan indikator pendukung dengan relevan, andal, dapat dibandingkan serta dipahami (Fauziah & Handayani, 2017). Oleh karena itu semakin baik penyajian laporan keuangan yang disajikan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Fauziah & Handayani (2017), Sabriani & Rahayu (2020) serta Putri (2017) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan Mulyanto et al., (2020) menunjukkan bahwa penyajian laporan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan teori serta uraian penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini

Ha₁ = Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

2.7.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses melalui media massa seperti surat kabar *website* dan lainnya yang dapat dengan mudah

diperoleh masyarakat dan bukan hanya pihak-pihak tertentu. Menurut Putri (2017) aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan penerapan penting dalam akuntansi keuangan daerah yang dilakukan pemerintah. Melalui aksesibilitas laporan keuangan masyarakat akan mudah untuk memperoleh informasi. Aksesibilitas laporan keuangan menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sederhananya, aksesibilitas laporan keuangan melekat dan sangat penting bagi masyarakat sebagai sumber informasi untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan. Untuk itu semakin baik aksesibilitas laporan keuangan yang disajikan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Fauziah & Handayani (2017) dan Putri (2017) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan Defana & Rahayu (2023) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Mulyanto et al., (2020) menunjukkan bahwa aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan teori serta uraian penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini

Ha₂ = Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

2.7.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal menjelaskan bahwa

“Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sistem pengendalian internal yang memiliki struktur, metode dan ukuran yang digunakan sebagai pendorong dalam kepatuhan, ketelitian serta keandalan, dalam kelompok atau organisasi, selain itu sistem pengendalian memberikan kebijakan jaminan hukum sesuai dengan ketentuan yang disusun oleh komisaris, pihak manajemen serta personel lainnya agar mendapatkan kejelasan atas tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga mengurangi terjadi pelanggaran (Gustina, 2021). Untuk itu semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Sabriani & Rahayu (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian

yang dilakukan Mulyanto et al., (2020) menunjukkan sistem pengendalian internal memperkuat sistem akuntansi keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penelitian ini menunjukkan sistem pengendalian internal tidak memoderasi aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta sistem pengendalian internal memperlemah desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan Defana & Rahayu (2023) sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Berdasarkan teori serta uraian penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini

Ha3 = Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah